

Analisis Komparatif Kebijakan Pendidikan di Iran, Mesir, dan Turki: Ideologi, Reformasi, dan Tantangan Globalisasi

Zahra Albaturrizkiyah Lubis¹, Abdusima Nasution²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

zahralbs99@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze and compare educational policies in Iran, Egypt, and Turkey, three Muslim-majority countries with distinct ideological foundations and educational systems. Employing a library research method with a comparative approach, the study draws upon academic literature, policy documents, and previous research findings. The results indicate that Iran maintains a highly centralized education system characterized by a theocratic orientation and strong state control over curricula and higher education. Egypt adopts a dual educational structure that integrates the national secular system with the religious education system of Al-Azhar, seeking to balance modernization with the preservation of Islamic traditions. In contrast, Turkey emphasizes educational modernization through the development of twenty-first-century competencies, digital transformation, and the internationalization of higher education based on global standards. Despite their differing policy orientations, all three countries face similar challenges, including ensuring equitable access to education, improving educational quality, aligning educational outcomes with labor market demands, and responding effectively to the pressures of globalization. The findings further demonstrate that ideological orientations and political structures play a crucial role in shaping educational reforms and policy implementation within each country.

Keywords: educational policy, Iran, Egypt, Turkey, comparative education, educational globalization.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan kebijakan pendidikan di Iran, Mesir, dan Turki sebagai tiga negara mayoritas Muslim yang memiliki latar belakang ideologi dan sistem pendidikan yang berbeda. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan komparatif melalui analisis berbagai literatur akademik, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Iran menerapkan sistem pendidikan yang sangat terpusat dengan orientasi teokratis dan kontrol negara yang kuat terhadap kurikulum serta pendidikan tinggi. Mesir mengembangkan sistem pendidikan ganda yang memadukan pendidikan sekuler nasional dan pendidikan keagamaan Al-Azhar, sehingga berupaya menyeimbangkan modernisasi dan pelestarian tradisi Islam. Sementara itu, Turki menekankan modernisasi pendidikan, penguatan kompetensi abad ke-21, digitalisasi, serta internasionalisasi pendidikan tinggi melalui adopsi standar global. Ketiga negara menghadapi tantangan yang relatif serupa berupa pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, serta respons terhadap tuntutan globalisasi. Perbedaan orientasi ideologi dan struktur politik terbukti menjadi faktor penting yang memengaruhi arah reformasi dan implementasi kebijakan pendidikan di masing-masing negara.

Kata kunci: kebijakan pendidikan, Iran, Mesir, Turki, pendidikan komparatif, globalisasi pendidikan.

Copyright (c) 2026 Zahra Albaturrizkiyah Lubis, Abdusima Nasution

✉ Corresponding author: Zahra Albaturrizkiyah Lubis

Email Address: zahralbs99@gmail.com (Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan)

Received 10 Juli 2025, Accepted 16 Juli 2026, Published 19 Juli 2026

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen strategis pembangunan sosial dan ekonomi karena bukan hanya mentransfer pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga membentuk nilai, identitas, serta legitimasi ideologi yang dominan dalam sebuah masyarakat. Dalam kajian kebijakan publik, pendidikan dipahami sebagai respons negara terhadap tantangan struktur sosial-ekonomi, tuntutan pasar tenaga

kerja, serta kebutuhan legitimasi politik (*public policy lens*). Dalam konteks negara Muslim mayoritas seperti Iran, Mesir, dan Turki, karakter kebijakan pendidikan tidak semata soal pengelolaan kurikulum atau akses pendidikan, tetapi mencerminkan konstruksi relasi ideologi, kekuasaan, dan pembangunan nasional (Zulkifli1, Rosyada Dede 2, Zainur Muhammad3, 2025).

Di *Iran*, sistem pendidikan dikembangkan dalam kerangka ideologi teokratis yang dibangun sejak Revolusi Islam 1979. Kurikulum nasional, lembaga pendidikan Islam seperti *Hauzah Ilmiyya*, serta penekanan pada nilai-nilai Syiah menjadi bagian integral dari kebijakan pendidikan negara. Ini tidak hanya mengatur struktur formal pendidikan, tetapi juga menempatkan pendidikan sebagai alat pembentukan identitas nasional yang sesuai dengan interpretasi teologis yang dominan. Kendati demikian, kebijakan ini menghadapi tantangan signifikan terkait pemerataan akses, modernisasi pedagogis, dan digitalisasi infrastruktur pendidikan—isu yang terus menjadi fokus kajian ilmiah kontemporer (Zulkifli1, Rosyada Dede 2, Zainur Muhammad3, 2025).

Sementara itu di *Mesir*, orientasi kebijakan pendidikan dibentuk oleh dualisme antara sistem sekuler nasional dan institusi pendidikan keagamaan tradisional seperti *Al-Azhar*. Kebijakan pendidikan di Mesir berupaya mengintegrasikan reformasi kurikulum untuk memasukkan keterampilan abad ke-21, merespons globalisasi, serta mengharmonisasikan nilai-nilai agama dan sekuler dalam kerangka pendidikan nasional. Kompleksitas tersebut mencerminkan bagaimana struktur pendidikan Mesir berperan sebagai arena negosiasi antara tradisi keagamaan yang kuat dan tuntutan modernisasi yang luas (Kusumajati, 2024).

Dalam perbandingan ketiga negara, *Turki* menunjukkan pola yang berbeda: pendidikan dibentuk dalam konteks sekulerisme yang bertransformasi dan dinamika ideologis yang berubah seiring rezim pemerintahan. Sejak era Kemalisme, sekularisme menjadi pilar utama dalam pemikiran pendidikan nasional, namun dalam prakteknya kurikulum dan institusi pendidikan di Turki terus mengalami penyesuaian yang merefleksikan kompromi antara nilai-nilai sekuler, tradisi Islam, dan tuntutan sosial kontemporer. Turki juga menjadi titik temu antara modernisasi pendidikan dan dinamika politik internal yang kuat (Kusumajati, 2024).

Perbandingan kebijakan pendidikan di ketiga negara tersebut penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana negara dengan latar ideologi yang berbeda dengan teokratis di Iran, struktur sekuler-religius ganda di Mesir, dan sekulerisme transformasional di Turki yang mengelola pendidikan sebagai alat pembangunan sosial dan ekonomi sekaligus legitimasi kekuasaan. Analisis komparatif memungkinkan pemahaman lebih dalam tentang pengaruh ideologi, struktur kekuasaan, dan tantangan ekonomi terhadap penyusunan serta implementasi kebijakan pendidikan secara nasional, sekaligus memperluas diskursus ilmiah mengenai pendidikan dalam konteks negara dengan mayoritas Muslim di abad ke-21 (Zulkifli1, Rosyada Dede 2, Zainur Muhammad3, 2025).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas sistem pendidikan di Iran, Mesir, maupun Turki secara terpisah, kajian yang secara komprehensif membandingkan ketiga negara tersebut dalam perspektif kebijakan pendidikan, ideologi, reformasi kurikulum, serta respons terhadap tantangan

globalisasi masih relatif terbatas. Padahal, perbedaan karakter ideologis dan politik di ketiga negara menawarkan ruang analisis yang penting untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan dirumuskan dan diimplementasikan dalam konteks negara mayoritas Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan pendidikan di Iran, Mesir, dan Turki dengan fokus pada orientasi kebijakan, reformasi pendidikan, tantangan implementasi, serta keterkaitannya dengan pembangunan sosial-ekonomi dan tuntutan globalisasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian pendidikan komparatif serta menjadi referensi bagi perumusan kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap dinamika global tanpa mengabaikan nilai-nilai dan identitas nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan **metode studi kepustakaan** (*library research*) untuk mengeksplorasi dan membandingkan kebijakan pendidikan di Iran, Mesir, dan Turki. Pendekatan ini memungkinkan peneliti meninjau, menilai, dan mensintesis literatur akademik serta dokumen kebijakan secara sistematis, tanpa melakukan pengumpulan data primer lapangan. Fokusnya adalah pada **analisis komparatif lintas-negara**, sehingga dapat mengidentifikasi perbedaan, persamaan, serta pola ideologi pendidikan yang memengaruhi perumusan dan implementasi kebijakan di masing-masing negara. Studi kepustakaan dipilih karena beberapa alasan: (1) Menyediakan **basis data teoritik dan empiris yang luas** dari jurnal internasional terindeks (termasuk Scopus), laporan resmi, dokumen pemerintah, dan penelitian komparatif terbaru. (2) Memungkinkan **analisis lintas konteks** yang kompleks antara sistem pendidikan tiga negara yang berbeda ideologi dan sejarah pendidikan. (3) Menjadi strategi metodologis yang diakui dalam penelitian kebijakan pendidikan modern, di mana fokus utama adalah pada sintesis temuan terdahulu untuk membangun kerangka analisis yang kuat (Muhammad et al., 2025).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Pendekatan Komparatif. Menggunakan beberapa tahapan seperti: (1) **Analisis Tema Kebijakan:** Mengidentifikasi tujuan, prinsip, dan fokus kebijakan pendidikan di masing-masing negara. (2) **Analisis Ideologi Pendidikan:** Menelaah peran ideologi teokratis di Iran, integrasi kurikulum sekuler dan religius di Mesir, serta sekulerisme yang bertransformasi di Turki dalam perumusan dan implementasi kebijakan. (3) **Reformasi Kurikulum & Pemerataan Akses:** Membandingkan desain kurikulum, strategi implementasi, dan akses pendidikan untuk memastikan kesetaraan sosial dan geografis. (4) **Hubungan Pendidikan dan Pembangunan:** Menilai kontribusi kebijakan pendidikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di tiap negara.

Analisis komparatif ini mengacu pada praktik terbaik penelitian kebijakan pendidikan lintas-negara, di mana perbedaan konteks, budaya, dan ideologi dijadikan lensa interpretatif untuk memahami efektivitas dan relevansi kebijakan (Pandey, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan Iran

1. Struktur Formal dan Orientasi Kebijakan Pendidikan di Iran

Sistem pendidikan Iran tetap **sangat terpusat dan dikontrol oleh negara**, dengan wewenang kuat atas *kurikulum, orientasi riset, dan kebijakan akademik* di semua jenjang pendidikan. Pendidikan wajib mencakup pendidikan dasar dan menengah, dikelola oleh *Ministry of Education* melalui kurikulum nasional yang seragam dan dikontrol ketat. Sebuah tinjauan umum menyatakan bahwa sistem pendidikan dasar hingga menengah mengikuti struktur formal tipe sekolah umum dan panduan **Islamisasi pendidikan yang meluas pascarevolusi 1979**; sejak revolusi tersebut, semua sekolah wajib memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum, termasuk pelajaran agama yang signifikan dalam jadwal harian siswa (Mostofi, 2026).

Di tingkat pendidikan tinggi, ada pemisahan administrasi antara lembaga akademik umum (*under Ministry of Science, Research and Technology*) dan institusi medis serta kesehatan (*under Ministry of Health*), serta sektor pendidikan tinggi non-pemerintah seperti *Islamic Azad University* yang berkembang pesat sejak 1980-an. Namun, secara keseluruhan, struktur pendidikan tinggi tetap terikat kuat oleh kebijakan negara melalui badan-badan strategis seperti *Supreme Council of the Cultural Revolution* yang menyetujui kurikulum, pengangkat tenaga akademik, dan agenda riset (Ramezani, 2025). **Kesenjangan antara bentuk struktur formal dan kinerja sistem** juga tampak dalam analisis akademik: meskipun Iran mengalami ekspansi pesat jumlah institusi dan mahasiswa sejak revolusi, berbagai kajian empiris mengindikasikan bahwa kuatnya kontrol negara seringkali membatasi *akuntabilitas kualitas, otonomi institusi, dan orientasi riset* yang sesungguhnya (Ramezani, 2025).

Setelah revolusi Islam, orientasi sistem tidak hanya administratif tetapi juga **ideologis**, di mana pendidikan menjadi bagian dari proyek pembentukan subjek sosial-politik yang *selaras dengan nilai-nilai Islam-syi'ah*. Studi terbaru pada kebijakan pendidikan tinggi menunjukkan dua orientasi dominan yang saling berpotensi konflik: **orientasi ekonomi (market-driven)** dan **orientasi agama (ideologis)**. Kebijakan tingkat nasional, seperti *Strategic Transformation Document of Science and Technology* serta *Comprehensive Scientific Map*, mencerminkan upaya merumuskan “manusia terdidik” sekaligus memprioritaskan kebutuhan pasar dan legitimasi ideologi negara (Ali Sabouri, 2026).

Serangkaian studi empiris menyatakan bahwa meskipun orientasi ideologis sebagai tujuan negara semakin kuat, **struktur kebijakan belum menghasilkan transformasi substantif yang meningkatkan kualitas pendidikan secara sistemik**. Analisis yang lebih luas terhadap agenda riset tingkat internasional menunjukkan bahwa dalam disiplin politik dan ilmu sosial, negara secara aktif *mengarahkan* topik penelitian lulusannya untuk mendukung *narrative politik yang pro-regime* dan melampaui kritik kritis terhadap struktur kekuasaan (Beidollahkhani, 2025). Selain itu, penelitian tentang model “*academic capitalism*” di Iran menggambarkan situasi unik di mana lembaga pendidikan tinggi beroperasi di bawah hibridisasi antara mekanisme neoliberal (market orientation) dan kontrol

negara. Dalam model ini, institusi memperoleh otonomi ekonomi terbatas, tetapi tetap dibatasi oleh kebijakan ideologis yang kuat dalam penetapan kurikulum dan agenda riset, yang secara kolektif membatasi kebebasan akademik (Ramezani, 2025).

Banyak kajian kritis mendukung temuan bahwa reformasi kebijakan pendidikan pascarevolusi tidak selalu menciptakan perbaikan struktural atau peningkatan kualitas holistik sistem pendidikan. Misalnya, kajian longitudinal menunjukkan bahwa ketika pemerintah mengganti berbagai “discourse” kebijakan—mulai dari Islamisasi, pembangunan, reformasi, hingga prioritas keadilan sosial—perubahan itu seringkali menghasilkan modifikasi aspek simbolik dan ideologis daripada perubahan nyata pada praktik pembelajaran dan struktur kelembagaan.

Evaluasi kelembagaan juga menunjukkan bahwa meski orientasi ideologis terus diperkuat (termasuk penyaringan staf akademik dan siswa untuk kesetiaan ideologis serta revisi kurikulum untuk menanamkan nilai agama), kualitas hasil pembelajaran dan relevansi riset terhadap dinamika global sering tertinggal. Hal ini diperkuat oleh studi scientometric yang memperlihatkan dampak jangka panjang revolusi terhadap output ilmiah Iran relatif terhadap negara-negara lain, yang menunjukkan pola “stagnasi” dibandingkan tren global dalam beberapa dekade (Ehsan Roohi, 2025).

Berdasarkan penjelasan tersebut secara kritis dapat disimpulkan bahwa : *pertama*, Struktur sistem tetap terpusat dengan kontrol negara kuat dari dasar hingga pendidikan tinggi, di mana Kurikulum nasional dan agenda riset dikontrol oleh lembaga negara tertinggi. *Kedua*, orientasi ideologis terus meningkat, terutama melalui dokumen strategis, kurikulum Islamisasi, dan penyaringan akademik, tetapi ia berinteraksi dengan *trends neoliberal* yang menciptakan *model hibrid* dalam pendidikan tinggi. *Ketiga*, Reformasi pascarevolusi sering bersifat struktural-simbolik, bukan transformasional dari sisi kualitas pendidikan dan riset. *Keempat*, Implementasi kebijakan ideologis tidak selalu selaras dengan apa yang dianggap sebagai standar internasional pendidikan, terutama di penelitian akademik dan otonomi institusi.

2. Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Riset

Iran menghadapi kontradiksi struktural yang serius dalam kebijakan pendidikan tingginya: negara teokratik berupaya mempertahankan kontrol ideologis yang kuat sekaligus mendorong integrasi dengan ilmu pengetahuan global dan mekanisme pasar akademik. Dalam konteks ini, konsep *academic capitalism* mencerminkan bagaimana institusi pendidikan tinggi berusaha mengadopsi logika pasar (misalnya komersialisasi penelitian, publikasi internasional, dan diversifikasi pendanaan), namun tetap beroperasi di bawah kendali politik dan ideologis yang ketat.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa Iran mengembangkan suatu model hibrida kapitalisme akademik yang menggabungkan strategi neoliberal, seperti orientasi pada pendanaan mandiri, perluasan program berbayar, dan peningkatan output penelitian dengan struktur kontrol negara yang kuat. Dalam model ini, universitas mengejar sumber pendanaan dan publikasi global sebagai respons terhadap tekanan ekonomi dan persaingan akademik global, tetapi keputusan strategis terkait arah penelitian, kebijakan kurikulum, dan tata kelola institusi tetap berada dalam bingkai agenda ideologis rezim.

Model hibrida ini menimbulkan beberapa dinamika kompleks: *pertama*, Dilema Otonomi Institusional dan Kebebasan Akademik: Walaupun institusi dituntut untuk bersaing dalam pasar global (mis. publikasi terindeks, kolaborasi internasional), kebijakan negara tetap menentukan batas-batas kebebasan akademik—termasuk pembatasan pada riset yang dianggap bertentangan dengan nilai ideologis atau keamanan nasional. Ini menciptakan ruang akademik yang “terbuka” secara parsial tetapi tetap dibatasi oleh kontrol ideologi negara. *Kedua*, Orientasi Prioritas Riset: Kebijakan resmi dan dokumen strategis pendidikan tinggi Iran menunjukkan bahwa agenda penelitian tidak hanya dipengaruhi oleh prioritas global (seperti ilmu pengetahuan terapan, sains data, dan inovasi teknologi), tetapi juga diarahkan untuk memperkuat nilai keagamaan dan politik nasional. Studi terbaru tentang *policy-mediated epistemic control* menunjukkan bahwa rezim menggunakan kebijakan pendidikan untuk memformulasikan arah disiplin ilmu dan prioritas riset yang konsisten dengan gagasan ideologisnya, sehingga membatasi disiplin tertentu dari keterlibatan penuh dalam jaringan ilmu pengetahuan global (Beidollahkhani, 2025).

Ketiga, Integrasi vs Proteksionisme Ilmiah: Di satu sisi, institusi Iran berupaya meningkatkan visibilitas internasional—misalnya melalui publikasi di jurnal terindeks dan kolaborasi lintas negara—akan tetapi struktur administratif dan pemilihan topik riset sering kali dipengaruhi oleh doktrin ideologis. Hal ini menciptakan ketegangan antara tuntutan modernisasi berbasis ilmu pengetahuan global dan kebutuhan untuk mempertahankan identitas ideologis nasional yang kuat sebagai bagian dari strategi legitimasi politik. *Keempat*, Pendidikan ‘Orang Berpendidikan’ dan Konflik Nilai: Kajian baru menggunakan kerangka *Islamic critical realism* pada kebijakan pendidikan tinggi Iran juga mengidentifikasi konflik mendasar antara orientasi ekonomi (misalnya kesiapan tenaga kerja, kompetisi global) dengan orientasi religius (nilai moral dan sosial yang dipromosikan oleh negara). Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa kebijakan pendidikan di Iran tidak sekadar dimotivasi oleh kebutuhan kompetitif global, tetapi juga sebagai arena perebutan nilai antara modernitas dan tradisi ideologis (Zulkifli¹, Rosyada Dede², Zainur Muhammad³, 2025).

Dengan demikian, ketegangan struktural ini menciptakan landscape pendidikan tinggi yang unik: *institusi beroperasi dalam sistem yang mencoba mensintesis modernisasi akademik berbasis pasar global dengan kontrol ideologis dan politik yang kuat*. Keseimbangan antara kedua hal tersebut terus menjadi tantangan utama dalam proses reformasi pendidikan tinggi Iran, karena kedua orientasi tersebut sering kali menarik kebijakan dan praktik akademik ke arah yang berbeda (Ramezani, 2025).

Sistem pendidikan di Iran sejak pasca-Revolusi Islam 1979 dibentuk dalam kerangka ideologis yang kuat, sehingga kebijakan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen politik dan nilai. Struktur pendidikan formal—mencakup pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dikendalikan secara sentral oleh negara melalui kementerian terkait dan badan kebijakan nasional. Kurikulum di semua jenjang dipengaruhi oleh agenda politik rezim dan nilai-nilai religius, dengan penekanan sistematis pada doktrin Islam Syiah dalam konten pembelajaran dan orientasi sosial.

Ketergantungan Kurikulum pada Agenda Politik Nasional dan Responsivitas terhadap Kebutuhan Global. Kurikulum pendidikan Iran menunjukkan tingkat *politisasi* yang tinggi—dimana konten dan struktur pembelajaran sering kali mencerminkan prioritas ideologis negara. Hal ini menimbulkan risiko rendahnya responsivitas terhadap tuntutan pasar kerja global, khususnya dalam hal keterampilan digital, pendekatan pedagogis inovatif, dan kesiapan tenaga kerja global. Studi menunjukkan bahwa isi kurikulum cenderung tradisional dan kurang adaptif terhadap perubahan global, termasuk kebutuhan keterampilan abad ke-21 (Zulkifli¹, Rosyada Dede², Zainur Muhammad³, 2025).

Selain itu, sejumlah literatur akademik mengidentifikasi bahwa orientasi politik dalam kurikulum dapat menciptakan distorsi dalam fokus pendidikan, sehingga aspek keterampilan teknis, sains modern, bahkan literasi digital tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam sebagian besar struktur pembelajaran formal. Karena itu, lulusan Iran sering menghadapi tantangan kompetitif ketika berkompetisi di pasar kerja global (Abdolahi & Corresponding, 2012).

Kesenjangan Implementasi Kebijakan dan Perbedaan Kualitas Pendidikan. Sistem pendidikan Iran bersifat *terpusat*, tetapi kenyataannya implementasi kebijakan sangat bervariasi antar wilayah. Sekolah di kawasan urban besar—terutama di Tehran dan kota-kota besar lainnya—umumnya mendapatkan fasilitas, tenaga pendidik berkualitas, dan akses teknologi yang lebih baik, sementara di daerah perdesaan dan daerah terpencil, akses terhadap sumber daya ini jauh lebih terbatas. Kondisi ini memperbesar kesenjangan kualitas pendidikan (Khademi & Budke, 2026).

Literatur *comparative education* baru juga menegaskan bahwa distribusi sumber daya pendidikan yang tidak merata berimplikasi langsung pada hasil belajar siswa, kesempatan pendidikan lanjutan, serta kemampuan adopsi pendekatan pembelajaran kontekstual yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Sistem yang terpusat cenderung menciptakan homogenisasi yang tidak sensitif terhadap *context-based learning*, sehingga kesenjangan antara sekolah urban dan rural justru melebar (Khademi & Budke, 2026).

Kontroversi Nilai: Modernitas vs Nilai Keagamaan. Pengintegrasian nilai religius dalam kurikulum Iran menjadi akar konflik normative yang signifikan. Di satu sisi, pemerintah menegaskan pentingnya nilai-nilai Islam dalam pendidikan sebagai identitas nasional dan moral. Di sisi lain, ada tuntutan untuk mendorong modernitas, kreativitas, dan pemikiran kritis yang biasanya terkait dengan standar pendidikan global. Pendekatan nilai-berbasis religius ini memiliki keuntungan dalam memperkuat identitas keagamaan dan sosial, tetapi juga dapat menjadi hambatan bagi inovasi pedagogis dan keterbukaan terhadap paradigma ilmu pengetahuan modern (Beidollahkhani, 2025).

Kebijakan Pendidikan Mesir

1. Sejarah dan Struktur Sistem Pendidikan

Dalam perspektif kontemporer sistem pendidikan di Republik Arab Mesir berkembang melalui lintasan sejarah panjang yang mencerminkan interaksi antara tradisi keagamaan dan modernisasi sekuler sejak awal abad ke-19 hingga era kontemporer. Model ganda antara pendidikan sekuler yang

diatur oleh negara dan pendidikan agama yang dipelopori oleh *Al-Azhar* menjadi ciri dominan sistem pendidikan Mesir saat ini.

Secara historis, pendidikan di Mesir berakar pada institusi-institusi Islam klasik sejak periode Fatimiyah, ketika *Al-Azhar* berdiri sebagai pusat pendidikan dan penyebaran ilmu agama serta sains klasik pada akhir abad ke-10 M. Institusi ini menjadi landasan pendidikan formal dan informal yang luas dalam sejarah Mesir panjang sebelum modernisasi sistem pendidikan oleh negara. Transformasi sistem lebih intensif terjadi pada abad ke-19 di bawah Muhammad Ali Pasha, ketika Mesir mulai mengadopsi model pendidikan modern ala Barat dengan membangun sekolah teknik dan militer untuk mendukung pembangunan nasional, sementara lembaga keagamaan tradisional tetap beroperasi secara paralel (Mardiah Aini1, Mislaini, 2025). Reformasi struktural modern terus berlangsung sepanjang abad ke-20, terutama pasca revolusi 1952, di mana pemerintah memperluas akses pendidikan umum dan menjadikan pendidikan dasar wajib serta berupaya menyeimbangkan modernisasi dengan tradisi pendidikan Islam (Gistituati & Ananda, 2021).

Karakter paling khas dari sistem pendidikan Mesir adalah **dualitas struktural** yang membagi jalur pendidikan formal menjadi dua sistem paralel utama: **pertama, Sistem Sekuler Nasional**. Pendidikan umum dan menengah diatur oleh *Ministry of Education* serta *Ministry of Higher Education and Scientific Research*, dengan kurikulum nasional yang seragam dan diberlakukan secara luas. Pendidikan dasar (primary dan preparatory) hingga menengah mengikuti struktur umum ini, termasuk kewajiban belajar sekitar sembilan tahun yang ditetapkan secara konstitusional. Pengelolaan kurikulum dan standar akademik di luar jalur *Al-Azhar* berada sepenuhnya di bawah otoritas negara (Devanda et al., 2022).

Kedua, Sistem Al-Azhar. Perkembangan pendidikan islam al-Azhar tak luput dari pengaruh sejarah sosial yang terkait pada masa itu. Adapun sejarah sosial pendidikan Islam era reformasi dan modern di al-Azhar dapat disimpulkan dalam beberapa hal. (1) latar belakang sosial al-Azhar. Dinasti Fatimiyah menjadikan Mesir sebagai pusat pemerintahan. Kemudian berdiri pula Dinasti Ayyubiyah di Mesir yang berpaham Sunni berdampak bagi perkembangan Al-Azhar. Di samping itu muncul pula Napoleon Bonaparte yang kemudian menguasai Mesir yang turut berdampak bagi perkembangan Al-Azhar. (2) latar belakang terjadinya pembaruan di Al-Azhar karena; bergesernya paham rasional Syi'ah pada ortodoksi ideologi Sunni; invasi Napoleon Bonaparte dari Prancis yang mengalahkan Kerajaan Turki Usmani di Mesir dalam waktu yang cepat; dan persentuhan peradaban Prancis yang dibawa Napoleon pada pendidikan di Al-Azhar. (3) tokoh dan ide pembaruan di Al-Azhar di Mesir dipelopori oleh Muhammad Ali Pasya, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rasyid Ridha yang berusaha melakukan reformasi dan modernisasi di Al-Azhar dengan memasukkan kurikulum-kurikulum dari Barat. Umat Islam dalam pandangan mereka harus keluar dari ketertinggalan melalui pembukaan kembali pemikiran rasional dan membuka diri terhadap peradaban modern yang ada di Barat seperti yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis (Tambak, 2016).

Sementara itu, Al-Azhar University dan jaringannya mengelola sistem pendidikan Islam yang memiliki otonomi administratif tertentu serta kurikulum yang menekankan pendidikan keagamaan, meskipun sejak tahun 1998 ada penyelarasan tahapan pendidikan *Al-Azhar* agar konsisten dengan sistem umum. Sistem ini mencakup sekolah dasar (*ibtida'i*), menengah (*I'dadi*), hingga *secondary*, dan melahirkan lulusan yang dapat memasuki Al-Azhar University secara langsung (Penelitian & Pendidikan, 2022).

Beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa struktur *Al-Azhar* saat ini mampu mengintegrasikan pengetahuan umum dan agama melalui kurikulum relatif moderat, tetapi tetap mempertahankan fokus kuat pada pelajaran Islam klasik serta nilai-nilai tradisional Muslim. Ini memperlihatkan pendekatan moderat yang mencoba menjembatani tradisi keagamaan dengan kebutuhan kontemporer tanpa melepaskan identitas keagamaannya (Mardiah Aini1, Mislaini, 2025). Dualisme ini menghasilkan **jalur pendidikan yang memengaruhi pemerataan akses dan integrasi nilai sosial di Mesir** (Siregar et al., 2025). Di satu sisi, pendidikan umum bertujuan memenuhi standar nasional dan kebutuhan tenaga kerja terampil; di sisi lain, jalur *Al-Azhar* berfokus pada pelestarian tradisi Islam sekaligus menghadapi tantangan integrasi ilmu modern seperti sains dan teknologi. Kebijakan kontemporer terus mencoba memperkuat hubungan antara dua sistem ini. Misalnya, reformasi kurikulum tahun 2014 berupaya memperkenalkan struktur pembelajaran yang lebih inklusif dan relevan, meskipun masih terdapat *inequality access* dan resistensi terhadap reformasi dari kelompok konservatif.

Fenomena ganda ini bukan hanya soal administrasi, melainkan juga mencerminkan **mode legitimasi sosial dan politik di Mesir**: negara berusaha menyeimbangkan tuntutan modernisasi pendidikan umum dengan kekuatan sosial institusi keagamaan yang historis kuat di masyarakat. Sejumlah kajian terbaru memandang struktur ini sebagai model yang khas di dunia Islam kontemporer, di mana integrasi nilai tradisi dengan tuntutan modern masih terus diupayakan tanpa mengorbankan salah satu (Lestari & Susmiati, 2026).

Berdasarkan penjelasan di atas secara kritis penulis menyimpulkan bahwa, pertama: sistem pendidikan Mesir dibangun melalui proses panjang yang menggabungkan modernisasi pendidikan sekuler dengan tradisi keagamaan berakar historis di *Al-Azhar*. Kedua: dua struktur paralel antara nasional dan *Al-Azhar* akan menciptakan dinamika akses dan integrasi nilai sosial yang khas di Mesir. Ketiga: kebijakan kontemporer mencoba menyeimbangkan kebutuhan modern dengan kekuatan tradisi melalui reformasi kurikulum dan struktur kelembagaan.

2. Reformasi dan Tantangan

Mesir telah memulai beberapa reformasi untuk modernisasi pendidikan, termasuk penataan ulang struktur pendidikan dasar, integrasi kompetensi abad ke-21, serta upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Tantangan utamanya adalah pembiayaan pendidikan negara yang belum mencapai target proporsional terhadap PDB dan tenaga pengajar yang kurang memadai (Lestari & Susmiati, 2026).

Reformasi kurikulum juga perlu menyeimbangkan antara nilai tradisional dan tuntutan global untuk keterampilan digital dan abad ke-21 (Rohati, n.d.). Sebagaimana ditulis oleh Emma Kelsey bahwa pendidikan Mesir saat ini tengah mengalami transformasi besar melalui program reformasi *Education 2.0* yang berfokus pada digitalisasi kurikulum, kecerdasan buatan (AI), serta pergeseran dari hafalan ke pembelajaran berbasis kompetensi. Namun, langkah tersebut masih dibayangi oleh tantangan klasik seperti kepadatan kelas, keterbatasan infrastruktur, dan kesenjangan akses (Kelsey, n.d.).

Institusi *Al-Azhar* memiliki peran signifikan pada pendidikan agama di Mesir. Kebijakan integrasi antara kurikulum umum dan keagamaan berpengaruh pada identitas nasional dan sosial. Penelitian lain menunjukkan bahwa dualisme ini menciptakan tantangan dalam keseragaman kualitas pendidikan (Fatmal et al., 2025). *Al Azhar* berfungsi sebagai mercusuar dan episentrum pendidikan Islam global. Institusi ini tidak hanya membentuk karakter ilmuwan agama tetapi juga secara signifikan merumuskan kebijakan pendidikan Islam internasional melalui beberapa peran utama (Dayem's et al., 2024):

1. **Pusat Moderasi Islam (*Wasathiyyah*):** Kebijakan pendidikan *Al Azhar* berfokus pada doktrin Islam moderat, menolak radikalisme, dan menjadi rujukan utama fatwa serta kurikulum bagi lembaga pendidikan Islam di seluruh dunia (– et al., 2025).
2. **Modernisasi Kurikulum:** *Al Azhar* terus beradaptasi dengan mengintegrasikan ilmu-ilmu modern (sains, ekonomi, teknologi) ke dalam sistem pendidikannya, memastikan lulusannya relevan dengan tantangan zaman.
3. **Diplomasi Pendidikan Global:** Melalui kebijakan pengiriman ulama, guru, dan beasiswa, *Al Azhar* menyebarkan nilai-nilai pendidikan Islam ke berbagai negara termasuk Indonesia (Hayat, 2018).

Kebijakan Pendidikan Turki

1. Struktur Kebijakan dan Reformasi Pendidikan

Turki mengimplementasikan reformasi pendidikan yang cenderung menekankan modernisasi kurikulum, digitalisasi pendidikan, dan peningkatan kompetensi pembelajaran abad ke-21 sesuai kerangka global seperti OECD Learning Compass. Reformasi besar termasuk *Turkish Century Maarif Model*, yang menekankan literasi digital dan pedagogi berpusat pada siswa (Ethem Gürhan*, 2025). Struktur sistem pendidikan di Turki diatur secara terpusat oleh Kementerian Pendidikan Nasional (MEB). Reformasi besar terjadi pada tahun 2012 melalui kebijakan **sistem 4+4+4**, yang memperpanjang wajib belajar dari 8 tahun menjadi 12 tahun yang terbagi secara gratis untuk usia 6 hingga 19 tahun (Novita et al., 2024).

Tabel 1. Struktur Pendidikan Formal Turki

Jenjang Pendidikan	Struktur Pendidikan	Durasi
Pendidikan Dasar (Usia 6–14 Tahun)	Sekolah Dasar	4 Tahun
	Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Imam Hatip	4 Tahun
	Sekolah Menengah Umum (SMA)	4 Tahun

Pendidikan Menengah (Usia 14–18 Tahun)	Jalur Kejuruan	4 Tahun
	Sekolah Agama (İmam Hatip)	4 Tahun
Pendidikan Tinggi	Diploma (Ön Lisans)	2 Tahun
	Sarjana (Lisans)	2–4 Tahun
	Magister	2 Tahun
	Doktoral	3–4 Tahun
Lembaga Pengelola	Tahun Persiapan Bahasa (Hazırlık)	1 Tahun
	Dewan Pendidikan Tinggi (YÖK)	-

Kurikulum pendidikan di Turki berorientasi pada pengembangan kompetensi abad ke-21 melalui pendekatan berbasis keterampilan yang bertujuan membekali peserta didik dengan kemampuan yang relevan terhadap perkembangan zaman. Fokus utama kurikulum diarahkan pada penguatan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, serta pembelajaran sepanjang hayat sebagai bekal menghadapi tantangan global yang semakin kompleks (Metni et al., n.d.). Selain itu, sistem pendidikan Turki juga memberikan perhatian pada penguasaan bahasa asing dengan memperkenalkan pembelajaran bahasa Inggris maupun bahasa asing lainnya sejak jenjang sekolah dasar. Di sisi lain, pendidikan agama tetap menjadi bagian dari kurikulum nasional dengan tetap menjamin hak-hak kelompok minoritas agama sebagaimana diatur dalam Perjanjian Lausanne (Nurhasanah & Sassi, 2024). Untuk mendukung pemerataan akses pendidikan, pemerintah Turki mendistribusikan buku teks secara gratis kepada seluruh peserta didik. Meskipun demikian, banyak orang tua masih melengkapi kebutuhan belajar anak dengan buku panduan dari penerbit swasta guna meningkatkan kesiapan menghadapi ujian nasional (Metni et al., n.d.).

Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, Turki juga melakukan berbagai reformasi penting. Salah satu reformasi terbesar adalah penerapan sistem pendidikan 4+4+4 pada tahun 2012 yang mengubah pola wajib belajar sebelumnya menjadi 12 tahun pendidikan wajib yang terbagi ke dalam tiga jenjang masing-masing empat tahun. Selain itu, pemerintah memperkenalkan Kurikulum Abad Turki (Türkiye Yüzyılı) sebagai pendekatan reformasi kurikulum yang lebih holistik dengan menekankan fleksibilitas pembelajaran, penguatan kompetensi abad ke-21, serta internalisasi nilai-nilai karakter dan identitas nasional. Reformasi tersebut menunjukkan komitmen Turki dalam membangun sistem pendidikan yang mampu mengintegrasikan kebutuhan pembangunan nasional dengan tuntutan globalisasi dan perkembangan teknologi (Supriatna, 2016).

Turki mendukung internasionalisasi melalui keterlibatan institusi pendidikan tinggi dalam jaringan global dan penekanan pada akses pendidikan tinggi. Interaksi ini dipengaruhi kemungkinan penghapusan struktur lama dan adaptasi terhadap standar internasional. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas lulusan dan relevansi pendidikan terhadap pasar tenaga kerja (Novita et al., 2024). Namun, terdapat kritik bahwa tekanan neoliberalisme dan penekanan ujian nasional dapat memperlebar kesenjangan sosial dan reproduksi ketidaksetaraan pendidikan jika tidak diimbangi oleh kebijakan pemerataan yang kuat.

Pendidikan tinggi di Turki telah mengalami transformasi besar melalui globalisasi, yang ditandai dengan adopsi Proses Bologna yang menyelaraskan standar gelar dengan Eropa dan dibukanya ratusan

program studi dalam bahasa Inggris. Hal ini menjadikan Turki sebagai salah satu pusat pendidikan global utama bagi lebih dari 300.000 mahasiswa internasional (Diler Aba, 2013).

Berikut adalah pilar utama pendidikan tinggi di Turki dalam era globalisasi: **pertama, Adopsi Standar Eropa (Proses Bologna)**. Sejak bergabung dengan Area Pendidikan Tinggi Eropa, Turki menerapkan sistem transfer kredit ECTS (*European Credit Transfer and Accumulation System*). Ini memastikan bahwa kurikulum dan gelar yang dikeluarkan oleh universitas di Turki diakui secara luas oleh institusi pendidikan serta pasar tenaga kerja di Amerika dan Eropa (Diler Aba, 2013). **Kedua, Peningkatan Mobilitas dan Mahasiswa Internasional**. Turki menduduki peringkat tinggi secara global untuk akses dan jumlah pelajar asing. Kampus-kampus top berstandar internasional yang diakui dunia tersebar di berbagai kota seperti Istanbul, Ankara, dan Izmir. Akses ini dimudahkan melalui pendaftaran internasional dan program beasiswa komprehensif dari pemerintah, seperti Türkiye Bursları.

Ketiga, Kerjasama dan Kolaborasi Akademik. Untuk memperkuat daya saing lulusan dan memfasilitasi riset kelas dunia, universitas di Turki secara masif menjalin kolaborasi lintas negara. Contoh nyata adalah kemitraan strategis dengan institusi di Indonesia untuk pertukaran pelajar dan kolaborasi lintas disiplin ilmu. **Keempat, Pusat Riset dan Pengembangan**. Dalam skala global, Turki berfokus pada penelitian terapan dan dasar yang dikoordinasikan oleh lembaga prestisius seperti TÜBİTAK (Dewan Riset Ilmiah dan Teknologi Turki). Kekuatan risetnya difokuskan pada sektor global seperti bioteknologi, teknologi informasi, hingga kedokteran. **Kelima, Akses Masuk dan Pembelajaran Bahasa**. Penerimaan mahasiswa asing umumnya menggunakan ujian khusus YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) atau seleksi nilai ijazah/SAT. Bagi mahasiswa yang program studinya memerlukan penguasaan bahasa lokal, universitas mewajibkan program persiapan bahasa yang dikenal dengan kursus TÖMER selama 9 hingga 10 bulan.

Berdasarkan paparan di atas globalisasi telah mendorong pendidikan tinggi di Turki menuju internasionalisasi melalui peningkatan mobilitas mahasiswa, kurikulum berbasis Eropa (Proses Bologna), dan program beasiswa. Kebijakan ini memperkuat posisi Turki sebagai pusat pendidikan regional.

Analisis Komparatif Antara Iran, Mesir, Dan Turki

Analisis komparatif terhadap kebijakan pendidikan di Iran, Mesir, dan Turki menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam orientasi kebijakan, reformasi pendidikan, pemerataan akses, hubungan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, serta tingkat keterbukaan terhadap globalisasi. Perbedaan tersebut tidak terlepas dari latar belakang sejarah, ideologi, dan sistem politik yang berkembang di masing-masing negara. Iran mengembangkan sistem pendidikan yang berlandaskan ideologi teokratis dengan kontrol negara yang kuat terhadap kurikulum dan pendidikan tinggi. Mesir mengadopsi model pendidikan ganda yang memadukan sistem pendidikan sekuler nasional dengan pendidikan keagamaan Al-Azhar. Sementara itu, Turki cenderung mengembangkan sistem pendidikan

yang lebih sekuler dan modern dengan orientasi yang kuat pada internasionalisasi dan penguatan kompetensi abad ke-21.

Meskipun ketiga negara sama-sama berupaya meningkatkan kualitas pendidikan sebagai instrumen pembangunan nasional, strategi yang ditempuh menunjukkan karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat diamati melalui beberapa aspek utama, yaitu orientasi kebijakan pendidikan, pemerataan akses pendidikan, reformasi kurikulum, keterkaitan pendidikan dengan pasar kerja, serta respons terhadap globalisasi dan internasionalisasi pendidikan. Perbandingan tersebut disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. Perbandingan Kebijakan Pendidikan di Iran, Mesir, dan Turki

Kategori	Iran	Mesir	Turki
Orientasi Kebijakan	Teokratis + kontrol negara kuat	Sekuler + religius (dual system)	Sekuler modern + internasionalisasi
Pemerataan Akses	Ketidakmerataan di daerah	Tantangan infrastruktur & pembiayaan	Upaya inklusi digital namun masih ada disparitas
Reformasi Kurikulum	Ideologi dominan	Dualisme kurikulum	Modernisasi kompetensi abad 21
Hubungan Pendidikan-Pasar Kerja	Belum optimal	Kurang selaras	Fokus meningkatkan relevansi
Globalisasi dan Internasionalisasi	Kurang responsif	Sedang berkembang	Lebih integratif

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa orientasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama yang membedakan sistem pendidikan di ketiga negara. Iran mempertahankan pendekatan teokratis yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen pembentukan identitas ideologis negara, sedangkan Mesir mengembangkan keseimbangan antara nilai-nilai sekuler dan keagamaan melalui sistem pendidikan ganda. Berbeda dengan keduanya, Turki lebih menekankan modernisasi pendidikan dan integrasi dengan standar pendidikan internasional. Perbedaan orientasi tersebut kemudian memengaruhi arah reformasi kurikulum, tata kelola pendidikan, serta prioritas pembangunan sumber daya manusia di masing-masing negara.

Dari aspek pemerataan akses pendidikan, ketiga negara masih menghadapi tantangan yang berbeda. Iran menghadapi kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Mesir masih berhadapan dengan persoalan keterbatasan infrastruktur dan pembiayaan pendidikan yang memengaruhi kualitas layanan pendidikan. Sementara itu, Turki telah melakukan berbagai upaya untuk memperluas akses melalui digitalisasi pendidikan, meskipun disparitas antardaerah masih ditemukan. Pada aspek reformasi kurikulum, Iran cenderung mempertahankan dominasi ideologi dalam pendidikan, Mesir berupaya mengintegrasikan kurikulum sekuler dan religius, sedangkan Turki fokus pada pengembangan kompetensi abad ke-21 yang mencakup literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan pembelajaran sepanjang hayat.

Selain itu, hubungan antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja juga menunjukkan tingkat efektivitas yang berbeda. Sistem pendidikan Iran dan Mesir masih menghadapi tantangan dalam

menyelaraskan lulusan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Sebaliknya, Turki secara lebih aktif mengarahkan reformasi pendidikan untuk meningkatkan relevansi lulusan terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja nasional maupun global. Dalam konteks globalisasi dan internasionalisasi pendidikan, Turki menunjukkan tingkat integrasi yang lebih tinggi melalui penerapan standar internasional, kerja sama akademik global, dan peningkatan mobilitas mahasiswa. Mesir berada pada tahap perkembangan menuju internasionalisasi, sedangkan Iran cenderung lebih terbatas karena pengaruh orientasi ideologis dan kontrol negara yang kuat. Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa ideologi, struktur politik, dan strategi pembangunan nasional memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan arah dan efektivitas kebijakan pendidikan di masing-masing negara.

Diskusi Kesulitan Pengambilan Keputusan Kebijakan

1. Kaitan Politik dan Pendidikan

Hasil analisis menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan kebijakan pendidikan di Iran, Mesir, dan Turki tidak dapat dilepaskan dari pengaruh struktur politik, ideologi negara, dan dinamika kekuasaan yang berkembang di masing-masing negara. Pendidikan bukan sekadar instrumen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembentukan identitas nasional, legitimasi politik, dan reproduksi nilai-nilai yang dianggap penting oleh negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan yang dirumuskan sering kali mencerminkan kepentingan politik dan ideologi yang dominan.

Di Iran, kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan teokratis yang berkembang pasca Revolusi Islam 1979. Pendidikan digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat nilai-nilai Islam Syiah dan menjaga stabilitas ideologis negara. Akibatnya, proses reformasi pendidikan sering menghadapi dilema antara mempertahankan identitas ideologis dan memenuhi tuntutan modernisasi pendidikan. Upaya untuk meningkatkan kualitas riset, memperluas kebebasan akademik, dan memperkuat daya saing global sering kali harus disesuaikan dengan batasan-batasan ideologis yang ditetapkan negara. Kondisi ini menjadikan proses pengambilan keputusan pendidikan di Iran relatif kompleks karena harus menyeimbangkan kepentingan politik, agama, dan kebutuhan pembangunan nasional secara bersamaan.

Di Mesir, kompleksitas kebijakan pendidikan muncul dari keberadaan sistem pendidikan ganda yang menggabungkan pendidikan sekuler nasional dan pendidikan keagamaan Al-Azhar. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai kepentingan ketika melakukan reformasi pendidikan, terutama dalam menentukan keseimbangan antara pelestarian tradisi keagamaan dan kebutuhan modernisasi kurikulum. Setiap perubahan kebijakan berpotensi menimbulkan perdebatan antara kelompok yang menginginkan penguatan nilai-nilai agama dengan kelompok yang mendorong pendidikan yang lebih adaptif terhadap perkembangan global. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan pendidikan di Mesir sering kali menjadi arena negosiasi antara kepentingan negara, institusi keagamaan, dan tuntutan masyarakat modern.

Sementara itu, Turki menunjukkan dinamika yang berbeda. Reformasi pendidikan di negara ini sangat dipengaruhi oleh perubahan orientasi politik yang terjadi dari waktu ke waktu. Sejak era Kemalisme, pendidikan diarahkan untuk memperkuat prinsip sekularisme dan modernisasi. Namun, perkembangan politik domestik dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan kembali nilai-nilai keagamaan ke dalam sistem pendidikan tanpa meninggalkan orientasi modernisasi dan internasionalisasi. Kondisi tersebut menyebabkan kebijakan pendidikan di Turki terus mengalami penyesuaian sesuai dengan arah pemerintahan yang berkuasa. Akibatnya, pengambilan keputusan pendidikan sering kali berada dalam tarik-menarik antara kepentingan modernisasi, identitas nasional, dan aspirasi sosial masyarakat.

Secara keseluruhan, pengalaman Iran, Mesir, dan Turki menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak pernah bersifat netral. Struktur politik, ideologi negara, serta konfigurasi kekuasaan memiliki pengaruh yang besar terhadap arah reformasi pendidikan, isi kurikulum, tata kelola institusi pendidikan, hingga tujuan akhir yang ingin dicapai melalui sistem pendidikan nasional.

2. Pengaruh Globalisasi Pendidikan

Selain faktor politik dan ideologi, tantangan lain yang memengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan pendidikan adalah globalisasi. Perkembangan teknologi informasi, ekonomi berbasis pengetahuan, serta meningkatnya mobilitas tenaga kerja global menuntut negara-negara untuk menyesuaikan sistem pendidikan mereka dengan kebutuhan abad ke-21. Kompetensi seperti literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan penguasaan bahasa asing menjadi tuntutan utama yang harus diakomodasi dalam kebijakan pendidikan modern (Saleh, 2015).

Meskipun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara tuntutan globalisasi dan kapasitas masing-masing negara dalam mengimplementasikan reformasi pendidikan secara efektif. Iran, misalnya, menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan standar pendidikan global dengan orientasi ideologis yang masih dominan dalam sistem pendidikan nasional. Mesir juga menghadapi hambatan berupa keterbatasan pendanaan, kepadatan peserta didik, kualitas infrastruktur pendidikan, serta kesenjangan antara sistem pendidikan umum dan pendidikan Al-Azhar. Sementara itu, Turki relatif lebih progresif dalam mengadopsi standar pendidikan internasional melalui reformasi kurikulum, digitalisasi pembelajaran, dan internasionalisasi pendidikan tinggi, meskipun masih menghadapi tantangan disparitas kualitas pendidikan antarwilayah.

Globalisasi juga menciptakan tekanan bagi pemerintah untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja domestik, tetapi juga memiliki daya saing internasional. Dalam konteks ini, negara dituntut untuk melakukan reformasi kurikulum, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memperluas akses teknologi pendidikan, serta memperkuat kolaborasi internasional. Namun, proses tersebut sering kali terbentur oleh keterbatasan birokrasi, sumber daya keuangan, serta resistensi dari kelompok-kelompok yang khawatir terhadap hilangnya identitas budaya dan nilai-nilai nasional.

Dengan demikian, kesulitan utama dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan di Iran, Mesir, dan Turki terletak pada upaya menyeimbangkan antara tuntutan globalisasi dan kebutuhan untuk mempertahankan identitas nasional masing-masing. Keberhasilan reformasi pendidikan sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal, kebutuhan pembangunan nasional, dan tuntutan global secara seimbang sehingga tercipta sistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing di tingkat internasional. Kebijakan pendidikan di ketiga negara sangat dipengaruhi oleh struktur politik internal. Ideologi nasional mempunyai dampak kuat terhadap reformasi pendidikan: Iran dengan agenda teokratisnya, Mesir dengan dualisme kurikulum sekuler-religius, dan Turki dengan fokus modernisasi sekuler yang terus mengalami transformasi melalui dinamika politik domestik.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan di Iran, Mesir, dan Turki menunjukkan bahwa sistem pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam merepresentasikan ideologi, kepentingan politik, dan arah pembangunan nasional masing-masing negara. Iran mengembangkan sistem pendidikan yang bercorak teokratis dengan kontrol negara yang kuat terhadap kurikulum, pendidikan tinggi, dan agenda riset. Mesir menerapkan sistem pendidikan ganda yang memadukan pendidikan sekuler nasional dan pendidikan keagamaan Al-Azhar sebagai upaya menjaga keseimbangan antara modernisasi dan tradisi Islam. Sementara itu, Turki lebih menekankan modernisasi, digitalisasi, pengembangan kompetensi abad ke-21, serta internasionalisasi pendidikan sesuai tuntutan global.

Meskipun memiliki orientasi kebijakan yang berbeda, ketiga negara menghadapi tantangan yang relatif serupa, yaitu pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, relevansi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa ideologi dan struktur politik menjadi faktor utama yang memengaruhi arah reformasi pendidikan dan implementasi kebijakan di masing-masing negara. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh orientasi ideologis yang dianut, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam menyeimbangkan nilai-nilai nasional dengan tuntutan perubahan global guna mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- D. M. H. D.-D. Y. S.-D. A. I. P., Taufiq Nur Azis, M.Pd - Dr. Hj. Debibik Nabilatul Fauziah, M.-M., Budiman.SS.MSI.CHMQ, P.-D. F.-I. S. M. S.-W. N. M. I. K.-, Ika Atikah, S.H., M.H., CPM., CPArb - Nur Rochmat, M.Pd. - Dr. Ahmadih Rojalih Jawab, Lc., M., LL. M. - Dr. Mohamad Ramdon Dasuki Lc., MA. - Dr Zainal Abidin Husain, D. C.-I., Suardi Wekke, Ph.D - Rana Setiawan - Ya'kub HAR, S. M. M.-M. I. M., & S.H.I., M.Pd. - Muh Ihsanuddin, M. P. (2025). Grand Syekh AL-Azhar dan Perdamaian Dunia (Y. Syukur (ed.); 1st ed.). UDN PRESS.

- Abdollahi, M., & Corresponding, C. (2012). Studying the Impacts of Globalization on Iranian Education System. 5(1), 172–180. <https://doi.org/10.5539/ies.v5n1p172>
- Ali Sabouri, B. S. J. M. (2026). Unmasking the mirage: A critical examination of Iranian higher education policies on the educated person through Wilkinson's Islamic critical realism. SAGE Open. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/14782103251411952>
- Beidollahkhani, A. (2025). Policy - Mediated Epistemic Control: How Authoritarian Regimes Repurpose Graduate Political Science Research Agenda – The Case of Islamic Republic of Iran. Higher Education Policy, 0123456789. <https://doi.org/10.1057/s41307-025-00413-3>
- Dayem's, F. G. A., Fikr, A., Sutrisno, & Susilo, M. J. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Al-Azhar, Mesir pada Era Kontemporer. Buletin Edukasi Indonesia, 3(1), 27–37.
- Devanda, B., Gusta, W., Gistituati, N., & Ananda, A. (2022). Education System in Egypt. 1(6), 16–20.
- Diler Aba. (2013). Internationalization of higher education and student mobility in Europe and the case of Turkey. Cukurova University Faculty of Education Journal, 42(2), 99–110.
- Ehsan Roohi. (2025). The 1979 Iranian Revolution and the Lost Decade of Science: A Counterfactual Scientometric Analysis. Cornell University:, Physic and society.
- Ethem Gürhan*. (2025). Primary School Curriculum Reform in Türkiye: Analyzing Recent Innovations in National Education Policies. Al-Adzka, 15(1), 143–155.
- Fatmal, A. B., Yasin, J. A. B., Syukur, S., Selatan, A., Tenggara, A., & Utara, A. (2025). Epistemologi Reformisme Islam Abad ke-19 di Mesir: Transformasi Historis Pemikiran Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. 04(02), 161–176. <https://doi.org/10.38073/batuthah.v4i2.2818>
- Gistituati, N., & Ananda, A. (2021). Sistem pendidikan Mesir dan perbandingannya dengan Indonesia. 10(3), 395–413. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v10i2.4596>
- Hayat, M. (2018). IMPLEMENTASI KURIKULUM AL-AZHAR KAIRO DI SEKOLAH DASAR AZHARI ISLAMIC SCHOOL LEBAK BULUS – JAKARTA SELATAN TESIS. PTIQ Jakarta.
- Juliani, H., Mislaini, & Sabila, Sa. qurotul. (2024). Sejarah dan Sistem Pendidikan di Turk. Bhinneka Jurnal Bintang Pendidikan Dan Bahasa, 3(1), 257–278. <https://doi.org/DOI:10.59024/bhinneka.v3i1.1151>
- Kelsey, E. (n.d.). EDUCATIONAL REFORM IN EGYPT: SUCCESSES AND SETBACKS. Blog - Latest News.
- Khademi, S., & Budke, A. (2026). Challenges and solutions to implementing education for sustainable development in geography classes: an international comparison of geography teachers' perceptions (Germany-NRW and Iran). January, 1–19. <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1619566>
- Kusumajati, C. (2024). Comparative Analysis of Educational Policies and Systems : A Case Study of Egyptian and Indonesian Higher Educations. 14(2), 103–112. <https://doi.org/10.38073/jpi.v14i2.1748>

- Lestari, R. E., & Susmiati, S. (2026). Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia dan Mesir (Historis , Kurikulum , Tantangan , JoEMS. 9(2), 179–195. <https://doi.org/10.32764/joems.v9i2.1738>
- Mardiah Aini¹, Mislaini, K. F. L. (2025). Perkembangan Sistem Pendidikan di Mesir. *Jurnal Yudistira Publikasi Riset Ilmu Pendidikan Dan Bahasa*, 3(1), 31–46. <https://doi.org/DOI:10.61132/yudistira.v3i1.1414>
- Metnİ, O., Eğİtİm, Mi., Türkİye, B., Maarİf, Y., Ne, M., & Bakiş, G. (n.d.). Maarif modeli.
- Mostofi, K. (2026). Education of Iran in Iran in Government and Society. In *Britanica*.
- Muhammad, J., Asep, R., & Farid, M. (2025). Library Research Methodology In Education: Fundamental Concepts and Implementation. *COGNITIVE: JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN*, 3, 128–137. <https://doi.org/DOI:10.61743/cg.v3i2.160>
- Novita, N. C., Sofya, A., & Annur, S. (2024). Dinamika Pendidikan Indonesia dan Turki : Studi Komparatif The Dynamics of Indonesian and Turkish Education : A Comparative Study. 4(3), 1748–1762.
- Nurhasanah, & Sassi, K. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI TURKI : MODEL PENDIDIKAN TERPADU ANTARA TRADISI DAN MODERNITAS. *Jurnal Al-Qayyimah*, 7(2), 89–109.
- Pandey, M. P. (2025). Innovative research methods in comparative education : emerging trends and applications. *Discover Education*, 4, 210. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s44217-025-00616-1>
- Penelitian, J., & Pendidikan, I. (2022). Sistem pendidikan di mesir. 1, 318–325.
- Ramezani, S. G. (2025). The Hybrid Model of Academic Capitalism in Iranian Higher Education : A Complex Interplay of Neoliberal and State - Controlled Practices. *Higher Education Policy*, 38(4), 665–692. <https://doi.org/10.1057/s41307-024-00364-1>
- Rohati, S. (n.d.). Sejarah dan perubahan, perkembangan pendidikan islam di mesir. 277–288.
- Saleh, M. N. I. (2015). Perbandingan Sistem Pendidikan di Tiga Negara ; Mesir , Iran dan Turki. IV, 49–70.
- Siregar, J. A., Sari, Z. A., Firstisya, P., Junatama, R. T., & Ahmad, A. (2025). Perbandingan Integrasi Nilai-Nilai Islam dan Ilmu Pengetahuan dalam Sistem Pendidikan di Indonesia dan Mesir *Julita*. 3(2), 16–22.
- Supriatna, N. (2016). *Ecopedagogy : membangun kecerdasan ekologis dalam pembelajaran IPS* (Nita (ed.); 2nd ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Tambak, S. (2016). Eksistensi Pendidikan Islam Al-Azhar : Sejarah Sosial Kelembagaan al-Azhar dan Pengaruhnya terhadap Kemajuan Pendidikan Islam Era Modernisasi di Mesir. 1(2), 115–139.
- Zulkifli¹, Rosyada Dede², Zainur Muhammad³, D. M. (2025). Pendidikan Islam di Iran: Gambaran Umum Struktur, Sistem, dan Kebijakan Pemerintah. *El-Banat*, 15, 422–436. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.54180/elbanat.2025.15.2.422-436>